

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada umumnya masalah kemiskinan berhubungan erat dengan permasalahan pertanian di Indonesia. Masalah paling dasar bagi sebagian besar petani Indonesia adalah masalah keterbatasan modal yang dimiliki oleh para petani. Permasalahan yang dihadapi dalam permodalan pertanian berkaitan langsung dengan kelembagaan selama ini, yaitu lemahnya organisasi tani, sistem dan prosedur penyaluran kredit yang rumit, birokratis dan kurang memperhatikan kondisi lingkungan sosial budaya pedesaan, sehingga sulit menyentuh kepentingan petani yang sebenarnya. Dalam rangka menanggulangi permasalahan tersebut, dicanangkan program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP). Program ini bertujuan untuk membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan menciptakan lapangan pekerjaan di pedesaan serta membantu penguatan modal dalam kegiatan usaha di bidang pertanian sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Kehadiran program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) diharapkan dapat mengatasi masalah kesulitan modal yang dihadapi petani.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang banyak dihadapi oleh setiap negara di dunia. Sektor pertanian salah satu sektor lapangan usaha yang selalu diindentikan dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Kemiskinan yang terjadi di sektor

pertanian pada umumnya ada di wilayah perdesaan, hal ini dikarenakan wilayah perdesaan adalah daerah yang kurang akses informasi dan teknologi. Selain itu, daerah perdesaan mengalami pembangunan yang tidak maju tidak demikian seperti di wilayah perkotaan.

Tabel 1. Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian Di Indonesia Tahun 2009 -2012

Tahun	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja
2009	8,20 Juta
2010	8,55 Juta
2011	5,59 Juta
2012	6,50 Juta

Sumber :BPS Indonesia

Pada Tabel 1 di atas penyerapan tenaga kerja di indonesia pada tahun 2009 – 2012 mengalami naik dan turun dilihat pada tahun 2009 – 2010 penyerapan tenaga kerja di indonesia mengalami peningkatan sebesar 350 ribu dimana pada tahun 2009 penyerapan tenaga kerja berjumlah 8,20 juta dan pada tahun 2010 penyerapan tenaga kerja 8,55 juta. Penyerapan tenaga kerja pada tahun 2010 – 2011 mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar 2,96 juta dilihat pada tahun 2011 penyerapan tenaga kerja 5,59 juta sedangkan pada tahun 2011 -2012 penyerapan tenaga kerja kembali mengalami peningkatan yaitu sebesar 510 ribu dilihat pada tahun 2011 jumlah penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di indonesia sebesar 6,50 juta.

Terlihat dari realitas ketidaktahuan petani akan adanya HPP (Harga Pembelian Pemerintah) dan pembelian oleh oknum terhadap hasil pertanian dibawah harga yang ditentukan oleh pemerintah, sehingga tidak sedikit dari petani yang tidak memperoleh keuntungan dari hasil pertaniannya bahkan mengalami kerugian. Oleh sebab itu, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagian besar petani

Indonesia tidak mengandalkan dari sektor pertanian, tetapi dari luar sektor pertanian seperti kerja sampingan buruh pabrik, kuli bangunan dan lain sebagainya.

Petani memiliki kendala atas sumberdaya manusia yang dimiliki. Terlihat dari rendahnya pendidikan yang dimiliki petani. Ini terjadi karena masih adanya stigma atau pandangan yang berkembang di tengah masyarakat bahwa menjadi petani adalah karena pilihan terakhir dikarenakan tidak memperoleh tempat di sektor lain. Faktor penyebab lainnya adalah pemerintah yang berpihak pada sektor industri dari pada sektor pertanian yang berdampak pada semakin menyempitnya lahan yang dimiliki oleh petani akibat konversi lahan menjadi lahan industri maupun pemukiman. Keempat, masalah paling dasar bagi sebagian besar petani Indonesia adalah masalah keterbatasan modal yang dimiliki oleh para petani. Masalah modal tersebut diantaranya adalah sebagian besar petani mengalami kekurangan modal untuk berusaha dan memenuhi kebutuhan hidupnya, belum adanya asuransi pertanian masih adanya praktek sistem ijon dan sistem perbankan yang kurang peduli kepada petani.

Jika di dalam lagi permasalahan yang dihadapi petani adalah kekurangan modal untuk membeli input produksi pertanian. Peran kelompok tani sebagai lembaga desa yang mengayomi atau menyediakan sarana produksi pertanian perlumendapat dukungan dari semua pihak terutama pemerintah. Kemampuan petani dalam mengakses sumber-sumber permodalan sangat terbatas karena lembaga keuangan perbankan dan non perbankan menerapkan prinsip 5-C (Character, Collateral, Capacity, Capital dan Condition) dalam menilai usaha pertanian yang tidak semua persyaratan yang diminta dapat dipenuhi oleh petani.

Lampung sebagai provinsi dengan basis pertanian sudah seharusnya provinsi ini ditunjang oleh pusat teknologi dan institut. Dari sektor pertanian, Lampung sendiri dengan jumlah penduduk mencapai 9,046 juta jiwa sudah terkenal sebagai penghasil komoditas ubi kayu dan nanas kaleng terbesar pertama di tingkat nasional, bahkan internasional. Selain itu, untuk padi merupakan terbesar kedua di Sumatera dan tujuh di nasional, lalu jagung terbesar pertama di Sumatera dan ketiga secara nasional. Khusus untuk padi, pada tahun 2012 ini ditargetkan produksinya bisa mencapai 3,23 juta ton GKG atau naik 8,64% dari tahun sebelumnya.

Lampung Selatan merupakan bagian dari provinsi Lampung yang hasil pertaniannya sangat dominan. pada tahun 2011 lalu luas areal pertanian di Kabupaten Lampung Selatan mengalami peningkatan sebesar 4 persen. Yakni mencapai 67.715 hektar. Sementara di tahun 2010 lalu hanya mencapai 64.525 hektare. Daerah Kabupaten Lampung Selatan mempunyai daerah daratan kurang lebih 2.007, 01 km². Dari luas secara keseluruhan Kabupaten Lampung Selatan tersebut, 44.271 Ha digunakan sebagai lahan sawah, sedangkan sisanya yaitu 156.430 Ha merupakan lahan bukan sawah. Wilayah administrasi Kabupaten Lampung Selatan mempunyai batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Sunda
3. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pesawaran
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Lampung selatan

Tahun	Jumlah penduduk
2010	912.490 jiwa
2011	922.397 jiwa
2012	932.552 jiwa
2013	942.572 jiwa

Sumber : BPS Lampung Selatan

Dari Tabel 2 di atas pada tahun 2010 jumlah penduduknya ada 912.490 jiwa di tahun 2011 jumlah penduduknya 922.397 jiwa tahun 2012 jumlah penduduknya mengalami peningkatan menjadi 932.552 jiwa dan pada tahun 2013 jumlah penduduk di Lampung Selatan mencapai 942.572 jiwa.

Tabel 3. Jumlah gapoktan, kelompok tani, poslusdes dan lumbung pangan di Kabupaten Lampung Selatan, 2012

NO	Kelembagaan Masyarakat	Jumlah
1	Gapoktan	220
2	Kelompok Tani	3569
3	Poslusdes	249
4	Lumbung pangan	217

Sumber : BPS Lampung selatan

Gapoktan adalah gabungan kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Gapoktan dibentuk atas dasar (1) Kepentingan bersama antara anggota, (2) Berada pada kawasan usaha tani yang menjadi tanggung jawab bersama diantara anggota, (3) Mempunyai kader pengelolaan yang berdedikasi untuk menggerakkan petani, (4) Memiliki kader atau pimpinan yang diterima oleh petani lainnya, (5) Mempunyai kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar anggotanya, (6) Adanya dorongan atau manfaat dari tokoh masyarakat setempat. Membangun Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang ideal diperlukan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pembinaan yang berkelanjutan. Proses penumbuhan dan

pengembangan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang kuat dan mandiri diharapkan secara langsung dapat menyelesaikan permasalahan petani, pembiayaan dan pemasaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.273/KPTS/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani, pembinaan kelompok tani diarahkan pada penerapan sistem agribisnis, peningkatan peran, peran serta petani dan anggota masyarakat pedesaan.

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) merupakan kelembagaan ekonomi di pedesaan yang didalamnya bergabung kelompok-kelompok tani. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai aset kelembagaan dari

Kementrian Pertanian diharapkan dapat dibina dan dikawal selamanya oleh seluruh komponen masyarakat pertanian mulai dari pusat, provinsi, kab/kota hingga kecamatan untuk dapat melayani seluruh kebutuhan petani dipedesaan.

Secara umum, usaha di sektor pertanian masih dianggap beresiko tinggi, sedangkan skim kredit masih terbatas untuk usaha produksi, belum menyentuh kegiatan pra dan pasca produksi dan sampai saat ini belum berkembangnya lembaga penjamin serta belum adanya lembaga keuangan khusus yang menangani sektor pertanian (Syahyuti, 2007). Dalam rangka menanggulangi permasalahan tersebut, Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono telah mencanangkan program Revitalisasi Pertanian pada tanggal 11 Juni 2005 dengan program-program utama antara lain: Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Pengembangan Agribisnis, Peningkatan Kesejahteraan Petani serta Pengembangan Sumberdaya dan Pemantapan Pemanfaatannya, baik di bidang perikanan maupun kehutanan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.

Salah satu program jangka menengah (2005-2009) yang dicanangkan Kementerian Pertanian RI adalah memfokuskan pada pembangunan pertanian perdesaan. Langkah yang ditempuh adalah melalui pendekatan pengembangan usaha agribisnis dan memperkuat kelembagaan pertanian di perdesaan. Melalui Keputusan Menteri Pertanian (KEPMENTAN) Nomor PERMENTAN Nomor 09/Permentan/OT.140/2/2011 dibentuk tim Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) merupakan program terobosan Departemen Pertanian untuk penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah pusat dan daerah serta antar sub sektor. Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) berbentuk fasilitasi bantuan modal usaha petani anggota baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani. Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) memiliki tujuan antara lain: (1) Untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah. (2) Meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), penyuluh dan penyelia mitra tani. (3) Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis. (4) Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan dalam penelitian ini, maka permasalahan yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana pengaruh program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) terhadap kinerja usaha Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Lampung Selatan?
2. Bagaimana pengaruh kinerja usaha terhadap peningkatan tenaga kerja Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Lampung Selatan?

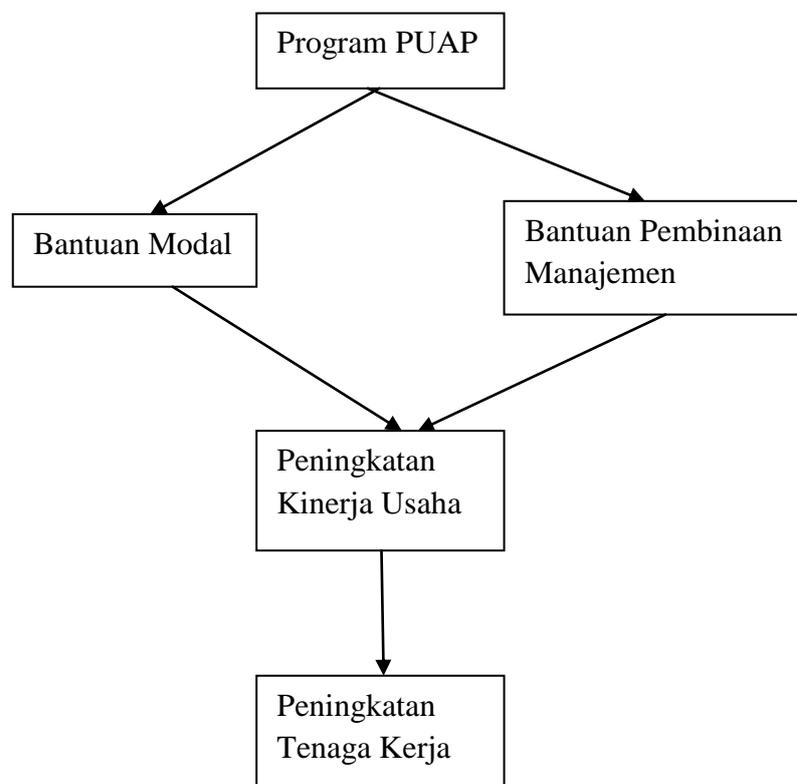
C. Tujuan Penelitian

Dari masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah pengaruh program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) terhadap kinerja usaha Gabungan Kelompok Tani (gapoktan) di Lampung Selatan
2. Untuk mengetahui apakah pengaruh kinerja usaha terhadap peningkatan tenaga kerja Gabungan Kelompok Tani (gapoktan) di Lampung Selatan

D. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini yang akan dianalisis adalah pengaruh Program Usaha Agribisnis Pedesaan berupa Bantuan Modal dan Bantuan Pembinaan Manajemen, program PUAP ini memiliki tujuan untuk peningkatan kinerja usaha yang mendapatkan program tersebut. Dan dengan peningkatan kinerja usaha tersebut dapat pula member peningkatan terhadap tenaga kerja di kelompok tani yang mengikuti program PUAP.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

E.Hipotesis

- 1.** Diduga Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) berpengaruh positif terhadap kinerja usaha Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Lampung Selatan.
- 2.** Diduga Kinerja Usaha berpengaruh positif terhadap peningkatan tenaga kerja Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Lampung Selatan.